

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEBAGAI TUAN RUMAH PADA RAKERNAS IV ASOSIASI BAPPEDA PROVINSI SE- INDONESIA TAHUN 2013

Pada tanggal 8 – 10 Februari 2012 telah diselenggarakan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Kepala Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia di Kota Ambon. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, H. Rusmadi hadir pada acara tersebut beserta Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, Kepala Sub Bagian Perencanaan Program, Kepala Sub Bagian Umum.

Rapat dibuka langsung oleh Gubernur Maluku, dalam rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Deputi Menteri PPN/Bappenas Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Staf Ahli Bidang Pembangunan Kementerian Dalam Negeri RI. dan Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tema pada Rakernas III di Ambon adalah :

"Membangun Indonesia Melalui Perluasan Jejaring Perencanaan Pembangunan Yang Bermutu dan Akuntabel Antara Pemerintahan, Akademisi, Dunia Usaha dan Komunitas Untuk Peningkatan Daya Saing Bangsa"

Rapat ini adalah agenda tahunan dari Asosiasi Kepala Bappeda Seluruh Indonesia dengan tujuan untuk melakukan pembahasan manajemen perencanaan, manajemen pengelolaan keuangan dan penatausahaan dan evaluasi hasil kesepakatan pada pelaksanaan rakernas pada tahun sebelumnya dan penetapan lokasi penyelenggaraan Rakernas pada tahun berikutnya.

Pada Rakernas Asosiasi Kepala Bappeda seluruh Indonesia III di Kota Ambon, Provinsi Kalimantan Timur mendapat kehormatan untuk pelaksanaan Rakernas IV tahun 2013 yang akan datang.

Dalam Rakernas tersebut dihasilkan Deklarasi Ambon yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan dan proaktif dalam memfasilitasi komunikasi perencanaan pembangunan Daerah dengan Pemerintah Pusat dan komunitas serta pihak-pihak pemberi hibah, dunia usaha dan investor baik berasal dari dalam maupun luar negeri untuk mempercepat perwujudan hasil-hasil perencanaan pembangunan di Daerah yang bermutu dan akuntabel;
2. Mengusulkan kepada Bappenas, untuk memfasilitasi beroperasinya piranti lunak Sistem Perencanaan secara real time dengan nama yang diusulkan adalah RKPINDO-ONLINE, sebagai sistem informasi yang sangat membantu perencanaan secara real time untuk mewujudkan bukan hanya RPJMN dan RPJMD tetapi juga RPJPN dan RPJPD secara konsisten;
3. Mendukung dan meningkatkan koordinasi dalam pembagian peran antar pihak pelaku pembangunan melalui Tim Koordinasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (TKP3EI) dan dukungan perencanaan untuk keberhasilan MP3EI, MP3KI, KEK, MDGs, RAD-GRK, RAD-Ketahanan Pangan dan Program-program Pro Rakyat di masing-masing Bappeda Provinsi;
4. Meningkatkan upaya advokasi secara proaktif dan mendalam untuk memberikan masukan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan perlunya revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah, khususnya untuk memperkuat peran dan fungsi lembaga Bappeda;
5. Penataan eselonisasi kelembagaan Bappeda Provinsi : Bappeda provinsi saat ini menjalankan fungsi koordinasi yang sangat beragam dan perlu kehati-hatian, yaitu :
 - a) Koordinasi perencanaan internal lintas OPD/Biro level provinsi;
 - b) Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Pusat – Daerah (APBN-APBD) dan Non APBD;
 - c) Koordinasi kegiatan Dekon/TP (APBN);
 - d) Koordinasi perencanaan implementasi kegiatan prioritas nasional;
 - e) Dukungan koordinasi dan sinergi perencanaan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah;

Untuk itu diusulkan :

- 1) Kepala Bappeda Provinsi yang saat ini eselon II.A menjadi eselon I.B dan jenjang jabatan structural dibawahnya naik satu tingkat;
- 2) Kepala Inspektorat Provinsi yang saat ini eselon II.A menjadi eselon I.B dan jenjang jabatan structural dibawahnya naik satu tingkat;
- 3) Sekretaris Daerah Provinsi yang saat ini eselon I.B menjadi eselon I.A dalam rangka membantu Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat.
6. Memfinalkan usulan perlunya perubahan stakeholders patern dari Segi Tiga menjadi Segi Empat dalam perencanaan program/kegiatan pembangunan, semula berbentuk kegiatan 3 (tiga) pilar yaitu : pilar pemerintahan, pilar dunia usaha dan pilar akademisi, menjadi berbentuk kegiatan 4 (empat) pilar, yaitu : pilar pemerintahan, pilar dunia usaha, pilar akademisi dan pilar KOMUNITAS;
7. Mengembangkan dan memfinalkan model perencanaan pembangunan komprehensif skala provinsi berbasis kompetisi serta melakukan konsultasi yang intensif kepada kementerian-kementerian/Lembaga guna mewujudkannya;
8. Mengusulkan kepada Bappenas dalam rangka efisiensi birokrasi untuk memfasilitasi penyederhanaan dan penggabungan berbagai laporan kinerja pemerintah Daerah kepada Presiden dengan tembusan kepada Kementerian/Lembaga dan DPRD;
9. Menyelesaikan penetapan Perda Tentang RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota melalui peningkatan kualitas komunikasi dengan BKPRN, Kementerian Kehutanan dan BPN;
10. Mengusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri RI untuk menerbitkan pedoman tatacara dan mekanisme pelaksanaan hak budget DPRD dalam rangka memandu konsistensi perencanaan dan penganggaran;
11. Menetapkan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV Asosiasi Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur pada bulan Februari Tahun 2013.